

RELASI GENDER DALAM ISLAM : TINJAUAN SOSIAL POLITIK

Wahidah Zein Br Siregar
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Indonesia
Email : wahidahsiregar@uinsby.ac.id

ABSTRACT

The 2010 population census shows that the total population of Indonesia is 237,641,326 and 207,176,162 people (87%) of whom are Muslims. To this fact, the conversation on Islam and its relation to many aspects of life is unavoidable, including the gender relation, i.e., the social role, traits or characters that society attach to women and men. The change in social, economic and political life have forced Muslim women to take part and to pursue careers in various fields, so they spend quite a lot of time outside the home. This phenomena, to some extent, bring to the consequence of problems of women-men relation in Islamic community, albeit the lucidity of Qur'anic and hadis message on the equality of the two before Allah. This paper aims to describe gender relation, the relation between men and women in Indonesian Muslim society from a socio-political perspective, which means to lie the data on the ideas, experiences, and beliefs as well as the social-political theories existed in the society. Highlighting how Islamic gender relation is in accordance with those shown by Muslims in their daily lives. Also, examining how the ebb and flow of debates about women's participation in formatting their 'self', their families, societies, and this country. In order to answer the social problems arise from this gender inequality, this paper offer a comprehensive approach of solution, starting from Individual approach, Interactional approach until Institutional approach. All these methods will make it possible to apply different theories to save the society from the condition of "Sick Society".

Keywords: Gender, Islam, Social, and Politic

ABSTRAK

Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah total penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa dan 207.176.162 orang (87%) diantaranya adalah umat Islam. Hal ini sehingga pengkaitan Islam ke berbagai masalah di masyarakat Indonesia menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, termasuk persoalan relasi gender yaitu tentang peran sosial, sifat atau karakter yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Perubahan sosial, ekonomi dan politik telah memaksa perempuan untuk ambil bagian dan bekerja keluar rumah dan berada di ruang publik. Fenomena ini, akhirnya, secara konsekuensial memunculkan permasalahan mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam, walaupun secara ajaran, al-Qur'an dan hadis telah memposisikan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan tentang relasi gender, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam di Indonesia dalam perspektif sosial politik, yaitu menggunakan ide-ide, pengalaman-pengalaman, kepercayaan-kepercayaan serta teori-teori sosial politik. Menyoroti bagaimana relasi gender dalam Islam dipraktikkan oleh ummat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, menelaah bagaimana pasang surut perdebatan tentang partisipasi perempuan dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan negara ini. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial akibat relasi gender yang tidak seimbang ditawarkan suatu pendekatan yang menyeluruh mulai dari; Pendekatan Individu; Pendekatan Interaksi; dan Pendekatan Institusi. Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan penggunaan berbagai teori untuk melepaskan masyarakat dari kondisi 'masyarakat sakit'.

Kata Kunci : Gender, Islam, Sosial, dan Politik.

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan, jumlah total penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa. 207.176.162 orang (87%) diantaranya adalah mereka yang beragama Islam.¹ Oleh karena itu, wajar jika Islam selalu menjadi pusat perhatian di negara ini. Meskipun negara ini bukan negara Islam, Ummat Islam akan memberi kontribusi yang besar bagi perjalanan sosial politik di negeri ini. Ummat Islam, misalnya, akan bertanya apakah kebijakan yang diambil oleh penguasa negeri ini bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam, apakah kegiatan yang dilakukan penduduk di negeri ini sesuai dengan ajaran Islam atau justru menjauhkan masyarakat dari ajaran Islam. Apakah keberadaan Islam di negara ini masih bisa terus berlangsung atau tidak.

Salah satu topik perbincangan yang menarik dan mendapat perhatian yang besar dari ummat Islam di Indonesia adalah tentang gender, tentang peran sosial, sifat atau karakter yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Ummat Islam dihadapkan pada kenyataan bahwa perempuan Muslim telah berkiprah dan meniti karir dalam berbagai

bidang kehidupan masyarakat, sehingga mereka menghabiskan cukup banyak waktu di luar rumah. Akibatnya, masyarakat kemudian bertanya bagaimana akibat dari berkurangnya waktu yang dihabiskan perempuan di dalam rumah. Siapakah yang akan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga? Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan di negeri ini masih sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam? Apakah perkembangan yang dialami oleh kaum perempuan di negeri ini menghasilkan perubahan yang sesuai dengan ajaran Islam? Apakah kegiatan yang dilakukan perempuan akan berdampak baik bagi diri perempuan sendiri dan keluarganya atau tidak? Apakah perubahan yang terjadi pada perempuan akan mengantarkan ummat Islam kepada perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak? Dengan kata lain, ummat Islam akan selalu bertanya apakah bertambah banyaknya kegiatan perempuan di masyarakat di berbagai bidang kehidupan ini masih sejalan dengan ajaran Islam atau tidak, akan memberi dampak positif kepada ummat atau tidak.

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu cukup beralasan, karena memang keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat terus meningkat. Mereka bahkan bisa saja meninggalkan rumahnya, keluarganya sampai bertahun-

¹ Badan Pusat Statistik, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*, sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321, diakses pada 20 Desember 2014.

tahun. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga merefleksikan kekhawatiran yang besar di kalangan ummat Islam bahwa aktifnya perempuan pada ranah publik, ranah di luar rumah, di masyarakat akan membuat perempuan lupa diri dan melanggar ajaran Islam, lupa pada peran utama yang diberikan kepadanya. Ummat Islam takut keaktifan perempuan di masyarakat akan menghancurkan Islam.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Dari sisi positif, dapat dikatakan bahwa masyarakat memberikan perhatian yang besar pada perempuan. Mereka tidak mau perempuan melanggar ajaran Islam. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan itu terkesan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang subjektif karena fokusnya hanya pada perempuan. Seolah-olah perubahan yang terjadi pada perempuan adalah semata-mata karena kemauan perempuan itu sendiri. Seolah-olah perkembangan yang terjadi pada perempuan merupakan perkembangan yang hanya dialami oleh perempuan dan sesuai dengan kehendak perempuan. Seolah-olah perempuan yang aktif berkegiatan di masyarakat akan menghancurkan Islam. Padahal perubahan yang terjadi pada perempuan diakibatkan oleh perubahan yang dialami ummat manusia secara keseluruhan, bukan semata-mata kehendak pribadi perempuan.

Perubahan sosial adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah, suka atau tidak suka. Kita berubah, orang-orang di sekitar kita berubah, lingkungan alam di sekitar kita pun ikut berubah. Karenanya, ummat Islam secara bersama-sama harus bisa mendiskusikan bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah sebagai akibat dari perubahan itu. Kehadiran perempuan secara lebih aktif di masyarakat adalah salah satu konsekuensi dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam pandangan penulis, meskipun, faktor keinginan pribadi perempuan tidak bisa diabaikan, bahwa perempuan ingin mengekspresikan potensi yang dimiliki untuk membangun masyarakat, ada banyak faktor lain yang ikut berkontribusi pada perubahan yang mereka alami, diantaranya faktor demografi, ekonomi, sosial dan politik, termasuk hubungan-hubungan regional maupun internasional. Dari faktor demografi, misalnya, jumlah penduduk terus bertambah dengan sangat cepat. Hal ini memaksa masyarakat untuk mendefinisikan kembali pola hidup mereka. Di masa yang lalu misalnya, nenek dan kakek kita berprinsip '*mangan ora mangan asal ngumpul*', makan seadanya tidak masalah asalkan semua anggota keluarga selalu berkumpul. Saat ini prinsip tersebut tidak lagi bisa terus

dipertahankan. Berkumpulnya seluruh keluarga (keluarga inti dan keluarga besar) secara terus menerus, ternyata menyulitkan. Rumah dan lahan menjadi bertambah sempit, sumber makanan pun menjadi berkurang. Akhirnya anggota keluarga dipaksa untuk keluar rumah, keluar dari desanya, mencari nafkah ke daerah lain. Perempuan yang dahulu berdiam saja di rumah pun ikut mencari nafkah di luar rumah.

Di sisi lain, terbatasnya sumber daya alam, memaksa manusia untuk mencari alternatif-alternatif baru bagi sumber-sumber kehidupan. Masyarakat berpikir keras, bagaimana agar sumber daya alam yang terbatas tersebut bisa dioptimalkan. Muncullah gagasan intensifikasi pertanian, industri manufaktur dan sebagainya. Intensifikasi pertanian mengurangi kegiatan perempuan di lahan pertanian, karena apa yang dahulu mereka lakukan telah digantikan oleh mesin. Dahulu pohon padi cukup tinggi, perempuan akan memanennya dengan menggunakan ani-ani. Saat ini pohon padi menjadi pendek, dipanen dengan sabit atau mesin dan dikerjakan oleh laki-laki. Akibatnya, perempuan kehilangan sebahagian pekerjaannya di sektor pertanian. Sementara itu, industri tumbuh dengan pesat, membutuhkan tenaga perempuan. Jika pertanian masih berada di lingkungan rumah, maka industri sudah

berada jauh dari rumah. Para perempuan pun di dorong oleh para pemilik pabrik untuk bekerja di pabrik mereka. Bahkan ada jenis-jenis pekerjaan di pabrik yang dianggap hanya cocok dilakukan oleh perempuan. Perempuan pun menjadi jauh dari rumahnya. Saat ini, bahkan para perempuan Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri, menjadi tenaga kerja wanita (TKW) dengan berbagai motif. Mayoritas mereka bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), karena kurangnya ketrampilan yang mereka miliki. Banyak masalah-masalah sosial yang cukup pelik, bagi keluarga, masyarakat, bahkan negara terkait dengan para TKW ini.

Belum lagi ketika berbicara dalam konteks perjalanan keadaan sosial dan politik di negeri ini. Sejak dahulu para pejuang kemerdekaan negeri ini memang mendorong partisipasi perempuan untuk meraih kemerdekaan. Laki-laki dan perempuan sama-sama terjajah, maka keduanya harus saling membantu agar negeri ini bisa merdeka. Keduanya sama-sama berjuang melawan penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Sama seperti Teuku Umar, Tjut Nyak Dien, meninggalkan rumahnya sekian lama, bergrilya sampai ke dalam hutan untuk memerdekakan negerinya dari penjajahan. Keadaan sosial politik pada masa penjajahan itu yang membuat laki-laki dan perempuan berjuang memperoleh

kemerdekaan. Kemerdekaan negeri ini, dengan demikian adalah hasil perjuangan bersama nenek dan kakek kita.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat ini akan mempengaruhi pada bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, ketika membicarakan tentang perempuan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka, maka perbincangan tersebut harus dikaitkan dengan konteks yang lebih luas. Semua aspek yang melingkupi termasuk aspek sosial politik. Laki-laki pun harus ikut memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang berbagai masalah yang terjadi pada keluarga, masyarakat sebagai akibat dari perubahan itu. Sehingga, debat kusir atau diskusi yang hanya menyalahkan satu pihak terhadap konsekuensi dari perubahan ini tidak akan terjadi.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan tentang relasi gender, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam di Indonesia dalam perspektif sosial politik. Menyoroti bagaimana relasi gender dalam Islam sesuai dengan yang diperlihatkan oleh ummat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, menelaah tentang bagaimana pasang surutnya perdebatan tentang partisipasi perempuan dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan negara ini. Sehingga, uraiannya akan lebih terfokus pada konteks sosial politik yang terjadi

pada ummat Islam di Indonesia, masalah-masalah sosial politik yang terjadi sebagai akibat dari semakin meningkatnya kiprah perempuan di masyarakat, menyebabkan laki-laki dan perempuan sama-sama menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah daripada di dalam rumah, dan bagaimana mencari alternatif pemecahannya. Tentu saja, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang akan penulis kutip karena ajaran Islam bersumber pada keduanya. Namun, penggunaannya tidak dimaksudkan untuk menjelaskan makna filosofis dari ayat Al Qur'an dan Hadits yang penulis kutip, tetapi lebih pada maksud untuk menguatkan argumentasi bahwa di dalam Islam ada dasar hukum bagi diperbolehkannya perempuan melaksanakan berbagai kegiatan di luar rumah, di masyarakat. Sehingga senada dengan argumen penulis sebelumnya, bahwa keaktifan perempuan membangun masyarakatnya bukan semata karena kemauan perempuan. Agama pun membolehkannya. Allah dan RasulNya mengetahui bahwa tidak mungkin seorang perempuan Muslim hanya berdiam diri ketika melihat masyarakat di sekitarnya memerlukan bantuan. Bagaimana mungkin seorang Muslimah tidak tergerak untuk ikut serta membantu masyarakat dan negaranya dalam mencapai kesejahteraan? Karenanya, dalam membicarakan

perubahan pada relasi gender sebagai akibat dari perubahan sosial yang lebih kompleks, ummat Islam bisa mencari jalan keluar yang adil dan baik bagi semua. Tidak menuduh satu pihak saja yang membuat terjadinya masalah-masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Islam.

Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat membantu membuka wawasan pembaca dan masyarakat pada umumnya untuk memandang perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki, sama pentingnya dengan laki-laki. Keduanya (laki-laki dan perempuan) sama-sama dapat membawa kebaikan pada masyarakat melalui berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Sebaliknya, keduanya juga dapat membuat keadaan masyarakat semakin buruk.

Laki-laki maupun perempuan diperlukan oleh keluarga dan masyarakatnya. Karenanya, berilah kesempatan kepada keduanya untuk berkarya secara maksimal, untuk mengoptimalkan potensi-potensi mereka. Pembagian peran yang sangat kaku pada laki-laki dan perempuan akan mengurangi kebaikan yang bisa mereka berikan kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Pemahaman-pemahaman secara filosofis yang kaku tentang ajaran Islam juga dapat mengaburkan ajaran Islam yang sesungguhnya atau bisa jadi itu adalah pertanda bahwa kita sesungguhnya belum

memahami dengan baik dan benar tentang ajaran-ajaran agama Islam.

PENDEKATAN SOSIAL POLITIK DALAM MEMAHAMI RELASI GENDER DALAM ISLAM

Di dalam bahasa Inggris, paling tidak ada empat istilah yang mendekati makna pendekatan, yaitu: *perspective*, *theory*, *approach*, dan *framework*. Berikut ini adalah makna masing-masing kata sebagaimana penulis kutip dari kamus Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners.

Perspective adalah “*way of thinking about something, especially one that is influenced by your beliefs or experiences*”.² Perspektif adalah cara berpikir tentang sesuatu, khususnya yang dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan atau pengalaman-pengalaman yang anda miliki. *Theory* adalah “*formal idea or set of ideas that is intended to explain something*”³. Teori adalah ide formal atau satu kumpulan ide-ide yang dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu. *Approach* memiliki beberapa makna dalam Bahasa Inggris. Akan tetapi yang mengandung makna hampir sama dengan perspektif dan teori adalah “*deal with or think about something*”⁴ (*a task, problem, or situation*).

² Collins Cobuild, *English Dictionary for Advanced Learners* (Glasgow: HarperCollins Publishers, 2001): hal 1149

³ Collins, *English Dictionary...*, hal 1617

⁴ Collins, *English Dictionary...*, hal. 66

Pendekatan adalah membahas atau memikirkan tentang sesuatu (apakah itu sebuah tugas, masalah, atau situasi tertentu). Sedangkan *framework* adalah “*particular set of rules, ideas, or beliefs which you use in order to deal with problems or to decide what to do*”⁵, kumpulan dari peraturan-peraturan, ide-ide atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang anda gunakan untuk memecahkan masalah-masalah atau memutuskan apa yang akan dilakukan.

Sehingga secara umum penulis bisa mengatakan bahwa pendekatan yang dimaksud dalam memahami relasi gender adalah ide-ide, pengalaman-pengalaman, kepercayaan-kepercayaan serta teori-teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fakta, fenomena, atau kejadian yang berhubungan dengan gender. Jika pendekatan tersebut adalah pendekatan sosial politik, maka ide-ide, pengalaman-pengalaman, kepercayaan-kepercayaan, atau teori-teori yang digunakan untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan relasi gender di masyarakat adalah ide-ide, pengalaman-pengalaman, kepercayaan-kepercayaan, atau teori-teori sosial politik. Karenanya, pembicaraan tentang relasi gender dalam Islam dalam perspektif sosial politik akan dilakukan dengan menggunakan ide-ide,

pengalaman-pengalaman, kepercayaan-kepercayaan serta teori-teori sosial politik.

Berikut ini adalah contoh yang bisa penulis kemukakan untuk melihat bagaimana penggunaan pendekatan sosial politik untuk memahami masalah sosial terkait gender. Ketika kita, misalnya, melihat bahwa di masyarakat Muslim terjadi ketidakadilan terhadap perempuan di dalam dunia kerja seperti perempuan digaji lebih rendah daripada laki-laki, maka pendekatan yang dipakai bukan pada aspek filosofis hukum Islam, bahwa mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki, sehingga wajar jika gaji perempuan lebih rendah. Akan tetapi, kita akan menggunakan teori-teori sosial politik. Kita akan mengkritisi berbagai hal yang menyebabkan terjadinya fakta ini. Apakah ada latar belakang sejarah tertentu yang menyebabkan hal ini? Apakah faktor jenis pekerjaan yang dilakukan? Apakah faktor *skills* perempuan yang kurang baik jika dibandingkan laki-laki? Apakah karena faktor latar belakang pendidikan? Apakah perempuan selalu cuti? Apakah karena ada faktor lainnya? Misalnya faktor ketakutan akan dominasi perempuan? Jikapun faktor pemahaman terhadap Islam bisa menjadi penyebabnya, kita akan bertanya, apakah pemahaman tersebut benar demikian adanya, benar-benar murni dari penafsiran Al Qur'an dan Hadits, atau bisa jadi ada motif lainnya? Tentu banyak teori yang

⁵ Collins, *English Dictionary...*, hal 625

bisa digunakan membantu memahami persoalan tersebut, dari berbagai disiplin ilmu.

Secara lebih jauh lagi, penulis sependapat dengan apa yang dicetuskan oleh Amy S Wharton. Dia mengatakan bahwa dalam memahami relasi gender, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan individu, pendekatan interaksi, dan pendekatan institusi (*individual, interactional, dan institutional approaches*).⁶ Ketiga pendekatan ini dapat menjelaskan mengapa suatu, fakta, phenomena, atau kejadian yang berkaitan dengan gender terjadi di masyarakat secara komprehensif. Sering sekali, fakta, phenomena, atau kejadian yang kita lihat di masyarakat bukan disebabkan oleh satu faktor yang tunggal, tetapi banyak. Menurut Wharton, ketiga pendekatan ini mampu membantu menjelaskan berbagai faktor yang terkait dengan fakta, phenomena, atau kejadian tersebut. Pemahaman yang lebih menyeluruh tentang berbagai faktor tersebut, akan membantu kita memberi alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah sosial yang disebabkan.

Berikut ini adalah contoh lain tentang permasalahan sosial terkait gender untuk melihat bagaimana ketiga

pendekatan ini bisa digunakan. Misalnya, kita melihat kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) semakin marak terjadi di masyarakat. Pendekatan individu dapat kita gunakan untuk mengetahui peran individu di dalam kasus itu. Kita dapat bertanya, siapa tokoh-tokoh dalam kejadian itu. Siapa pelaku KDRT tersebut? Siapa korbannya? Mengapa pelaku melakukan kekerasan tersebut? Apakah yang dilakukan keduanya sehingga kekerasan tersebut bisa terjadi? Apa sajakah motif individu melakukan kekerasan? Apakah ada kesamaan sebab antara kasus KDRT yang satu dengan kasus KDRT lainnya dari aspek individu-individu pelaku dan korbannya? Teori-teori psikologi, perbandingan dengan pengalaman-pengalaman pada kasus KDRT lainnya, dapat membantu kita menjelaskan hal ini.

Pendekatan interaksi juga dapat kita gunakan. Bagaimana relasi antara pelaku dan korban? Bagaimanakah komunikasi diantara mereka? Bagaimana interaksi mereka dengan masyarakat di lingkungannya? Apakah ada orang lain yang mempengaruhi terjadinya keadaan itu? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang mereka yakini, yang berhubungan dengan kejadian tersebut? Teori-teori dari psikologi, sosiologi, anthropologi, komunikasi, politik dan lain-lain dapat

⁶ Wharton, Amy S, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012), hal 16-18.

digunakan untuk membantu kita menjelaskan hal ini.

Begitu juga dengan pendekatan institusi, pendekatan kelembagaan. Kita dapat mempertanyakan bagaimanakah peran negara dalam KDRT ini? Apakah ada peraturan negara yang membicarakan hal ini? Bagaimana implementasi peraturan tersebut? Apakah yang dilakukan oleh institusi negara terhadap pelaku dan korban? Bisakah negara mengatasi KDRT ini? Atau jangan-jangan negara yang membuat maraknya KDRT ini. Keluarga-keluarga disibukkan dengan kemiskinan yang terus melanda mereka, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, perlindungan hukum yang tidak jelas, dan seterusnya. Teori-teori sosiologi, ekonomi, politik, dan hukum, tentu dapat membantu kita menjelaskan fenomena ini dari pendekatan institusi.

Ketiga pendekatan ini dapat membantu menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan fakta, fenomena, atau kejadian yang berhubungan dengan gender di masyarakat. Berbagai teori dari berbagai disiplin ilmu dapat digunakan dalam pendekatan-pendekatan ini. Jika dipertanyakan, manakah dari pendekatan ini yang lebih dominan dalam menjelaskan KDRT yang terjadi tersebut. Jawabannya tentu tidak bisa serta merta diberikan. Di setiap kasus KDRT bisa jadi ada latar belakang dan faktor penyebab yang

berbeda. Pendekatan-pendekatan yang lebih dominan dalam menjelaskannya juga akan berbeda, tergantung pada konteks kejadian saat itu, pada konteks tertentu.

Sekali lagi, jika kita ingin membahas tentang relasi gender dalam Islam dari perspektif sosial politik, maka kita akan melihat secara mendalam pada fakta, fenomena, kejadian-kejadian terkait gender yang terjadi pada masyarakat Islam dalam perspektif sosial politik. Kita dapat menggunakan pendekatan individu, interaksi, dan institusi, untuk membantu kita. Ketiga pendekatan ini memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai teori dari berbagai disiplin ilmu. Ini juga yang menjadi ciri khas dari studi gender sebagai sebuah *interdisciplinary study*. Dengan demikian, membicarakan sesuatu hal tentang masyarakat Islam dalam perspektif sosial politik, adalah membicarakan Islam berdasarkan apa yang dipraktikkan ummat Islam dalam kehidupan sehari-hari, apa yang mereka tunjukkan dalam sikapnya, secara individu, kelembagaan, maupun hubungan antar mereka, tidak hanya pada aspek-aspek filosofis saja dari ajaran Islam. Kita akan melihat Islam sebagai *the living facts*, bukan hanya sebagai *knowledge* atau *abstract ideas*

POSISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM ISLAM

Ada satu kalimat yang begitu melekat dalam benak penulis ketika membaca tulisan pembuka (sekapur sirih) dari Prof. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah yang ditulisnya: “Al- Qur’an al-karim adalah kitab yang oleh Rasulullah saw dinyatakan sebagai ‘Ma’dubatullah’ (Hidangan Ilahi)”⁷.

Dalam pandangan penulis, sebagai sebuah hidangan Allah, tentulah semua umat Islam, dari berbagai latar belakang, bisa menikmatinya. Dalam kaitannya dengan gender, maka laki-laki maupun perempuan dapat menikmati hidangan itu. Hidangan itu dapat menjadi obat bagi segala rasa haus dan lapar, segala kegalauan dari permasalahan yang dialami umat Islam akibat perubahan peran-peran sosial yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, pada keluarga, dan masyarakat. Tentu begitu juga dengan Hadits serta pandangan ulama yang membantu menjelaskan makna Al Qur’an. Yang membantu bagaimana umat Islam bisa menikmati hidangan Allah. Sehingga, tidak mungkin jika Al Qur’an, Hadits, dan pandangan ulama justru menjadi sebaliknya, menjadi penyebab bagi rasa haus dan lapar, penyebab bagi semakin keruhnya masalah yang terjadi. Jika ada

kalangan umat Islam yang menjadikan Al Qur’an dan Hadits, serta pandangan ulama sebagai penyebab permasalahan, maka mereka harus mengintrospeksi dirinya. Benarkah pemahamannya tentang Al Qur’an, Hadits, dan pandangan ulama tersebut?

Al Qur’an menyebutkan dengan jelas bahwa Allah menempatkan perempuan pada posisi yang sama dihadapan-Nya. Mereka juga diciptakan dari jenis yang sama. Amal baik yang mereka lakukan juga diberi nilai yang sama. Berikut ini terjemahan beberapa ayat Al Qur’an yang menyatakan tentang persamaan itu:

QS Al Hujurat (49): 13, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”. QS At Taubah (9): 71, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya

⁷ Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2002), hal. v.

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. QS An Nahl (16): 97, “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸

Dari ayat-ayat di atas, sebenarnya tidak ada penjelasan bahwa laki-laki lebih hebat dari perempuan, atau sebaliknya. Laki-laki menjadi superior dan perempuan menjadi inferior. Lalu mengapa dalam praktek kesehariannya umat Islam menempatkan laki-laki pada status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan? Mengapa terkesan Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah?

Inilah yang perlu di elaborasi lebih jauh oleh umat Islam. Apa yang menyebabkannya? Jika penyebab-penyebab itu telah ditemukan, maka diharapkan akan ada jalan keluar, bagaimana caranya mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al Qur’an yang sesungguhnya. Sehingga, semua laki-laki dan perempuan dari berbagai latar

belakang bisa benar-benar menikmati hidangan Ilahi tersebut. Menurut penulis, salah satu penyebab itu tentulah dinamika yang terjadi pada umat Islam, perubahan-perubahan sosial yang mereka alami. Berikut ini adalah uraian penulis tentang dinamika umat Islam di Indonesia. Dari uraian ini, penulis berharap pembaca dapat memahami salah satu penyebab dari terjadinya relasi gender yang tidak seimbang yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

DINAMIKA SOSIAL POLITIK UMAT ISLAM DI INDONESIA

Dalam pandangan penulis, umat Islam di Indonesia selalu ingin menyeleraskan setiap aktifitas yang dilakukannya dengan ajaran Islam. Hal ini tidak lain karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ingin menjadi Muslim yang baik, yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Meskipun tentu saja, ada sebahagian umat Islam yang tidak terlalu taat. Seperti yang dijelaskan oleh Fealy, perlu kehatian-hatian dalam menafsirkan jumlah umat Islam yang besar di Indonesia, karena setiap penduduk diwajibkan mencantumkan agamanya di dalam kartu tanda penduduk (KTP). Mereka yang merupakan pengikut dari kepercayaan atau agama yang tidak termasuk dalam agama resmi yang diakui oleh pemerintah,

⁸Al Qur’an dan Terjemahnya, http://geocities.com/alquran_indo, diakses September 2003.

biasanya mencantumkan Islam di dalam KTPnya.⁹

Dalam konteks melaksanakan aktivitas sesuai dengan ajaran Islam itu, terjadi perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Pertama, Islam bukanlah agama yang berasal dari Indonesia. Islam adalah agama yang lahir di jazirah Arab, diperkenalkan dan disebarkan oleh para pedagang yang datang ke Indonesia dari jazirah tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah ada agama dan kepercayaan masyarakat yang lebih dahulu hadir, yang berasal dari pemikiran asli orang Indonesia atau sama seperti Islam, yang dibawa oleh orang lainnya ke Indonesia. Tentu saja ajaran Islam akan selalu berinteraksi dengan agama atau kepercayaan orang Indonesia yang lainnya. Sehingga, pemahaman umat Islam Indonesia terhadap teks-teks tentang ajaran Islam bisa bervariasi sebagai pengaruh dari kepercayaan sebelumnya.

Kedua, masyarakat Indonesia secara kultural sangat beragam. Mereka memiliki tradisi, nilai, dan budaya yang berbeda-beda. Ada paling sedikit 350 suku bangsa di Indonesia dan 250 bahasa lokal

(daerah). Islam tentunya juga berinteraksi dengan tradisi, nilai, dan budaya masyarakat ini. Karenanya, implementasi ajaran Islam di Indonesia menjadi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Lihat saja bagaimana perbedaan perayaan maulid nabi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Sumatera dengan di Jawa. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam di tempat lahirnya agama ini. Cara berpakaian Muslimah Indonesia saat melaksanakan ibadah haji dan umroh sangat berbeda dengan Muslimah dari jazirah Arab.

Namun, ada sebahagian umat Islam di Indonesia yang menginginkan agar implementasi ajaran Islam di negeri ini sama dengan apa yang dipraktekkan oleh umat Islam di jazirah Arab, sehingga timbullah gesekan-gesekan atau perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan umat Islam Indonesia; antara yang tetap ingin mempertahankan Islam sesuai dengan karakteristik alamiah orang Indonesia dan mereka yang menginginkan Islam sesuai dengan karakteristik masyarakat tempat lahirnya agama ini. Di jazirah Arab sendiri, tentu juga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan tentang bagaimana mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena masyarakat Arab juga bukan merupakan satu kesatuan yang homogen. Lihat saja bagaimana terjadinya

⁹ Fealy, Greg, Virginia Hooker, and Sally White, "Indonesia", in Greg Fealy and Virginia Hooker (eds), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*, (Singapore:ISEAS, 2006), hal 39.

perpecahan di kalangan umat Islam di jazirah Arab dari mulai setelah wafatnya Rasulullah sampai sekarang ini. Sehingga sebetulnya dapat juga terjadi kebingungan bagi umat Islam di Indonesia. Jika ingin mencontoh apa yang ada di jazirah Arab, kelompok yang mana di jazirah Arab yang ingin di contoh.

Ketiga, Indonesia mengalami penjajahan barat yaitu Belanda dalam kurun yang sangat lama, 350 tahun. Penjajah Belanda tidak hanya mengambil kekayaan alam Indonesia tetapi juga kebebasan masyarakatnya untuk merdeka, Khusus bagi umat Islam, penjajah Belanda bahkan memberi ruang berekpresi yang sangat kecil. Belanda menjadikan umat Islam Indonesia sebagai mayoritas dengan kekuatan minoritas. Pengaruh penempatan Islam sebagai kekuatan minoritas ini masih terjadi sampai sekarang. Dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan di Indonesia, partai-partai Islam belum pernah memenangkan suara mayoritas. Partai-partai yang berorientasi nasionalislah yang selalu unggul. Dengan demikian yang mendominasi pemerintahan di Indonesia bukanlah orang-orang yang berasal dari partai-partai Islam, meskipun sebahagian besar dari mereka beragama Islam.

Pengaruh kebijakan Belanda yang merepresentasikan kekuatan barat ini menimbulkan semacam luka yang

mendalam bagi umat Islam Indonesia, terutama bagi mereka yang menginginkan agar Islam menjadi fondasi negara ini. Sehingga, sampai sekarang ketidak senangan terhadap pengaruh barat masih terasa kuat di sebahagian umat Islam di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan sejarah umat Islam di negara lain. Seperti yang dijelaskan oleh Giddens, pada masa abad pertengahan terjadi peperangan yang terus menerus antara negara-negara penganut agama Kristen di Eropa dengan negara-negara Islam. Negara-negara yang sempat dikuasai oleh Islam yang sekarang menjadi Spanyol, Yunani, Yugoslavia, Bulgaria, dan Rumania ditaklukkan dan dijajah oleh barat pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Sampai sekarang umat Islam tidak mampu secara efektif menghadang pengaruh barat. Akibatnya, keinginan untuk menantang barat ditunjukkan dengan cara menunjukkan identitas Islam.¹⁰ Aktifitas umat kemudian akan diperdebatkan dengan hangat jika aktifitas tersebut dianggap mengandung pengaruh barat. Sayangnya, pengaruh barat terhadap negara-negara Islam, termasuk Indonesia semakin kuat saja dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat. Kemajuan-kemajuan yang terjadi di negara-negara barat yang memang lebih pesat

¹⁰ Giddens, Anthony, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1994), hal. 479.

dibandingkan dengan di Indonesia, yang menjanjikan kesenangan dan kenikmatan hidup yang lebih indah, membuat masyarakat Indonesia lebih mengarahkan pandangannya ke barat. Mereka dengan cepat meniru apa yang dilakukan oleh masyarakat barat.

Keempat, dalam konteks global ini, Islam juga memberi pengaruh yang sangat besar pada sikap negara barat terhadap Indonesia terutama sejak terjadinya pengebomam terhadap gedung World Trade Center Amerika Serikat di New York pada tahun 2001 dan bom Bali pada tahun 2002. Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya menyorotkan matanya secara tajam pada gerak gerik politik ummat Islam di Indonesia. Memang Mark Weber pernah mensinyalir bahwa “*a traditional religious system like Islam could undergo a major revival and become the basis of important political developments in the late twentieth century*”.¹¹ Sehingga, Amerika dan sekutunya tampaknya merasa takut jika Islam benar-benar bangkit menjadi kekuatan dunia. Dengan kekuatan politik yang mereka miliki, mereka kemudian ingin selalu mempengaruhi perkembangan politik yang terjadi di negeri ini.

Barat juga menyoroti dengan tajam kiprah perempuan Muslimah. Tidak jarang

mereka mengklaim bahwa pakaian yang dikenakan oleh kaum perempuan Muslim merupakan simbol dari diskriminasi yang dialami perempuan dalam masyarakat Muslim. Di sisi lain, mereka sebenarnya juga takut bahwa pakaian kaum perempuan Muslim menunjukkan kekuatan dan kebangkitan Islam.

Semua keadaan yang telah penulis uraikan di atas menunjukkan betapa dinamisnya kondisi sosial politik yang dihadapi ummat Islam Indonesia. Perbedaan pendapat tentang berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan Islam bisa dengan mudah terjadi diantara sesama Muslim. Sehingga terkadang terlihat seperti terjadi perpecahan yang besar diantara mereka. Padahal di sisi lain interaksi dengan barat juga terus berlangsung, apakah interaksi tersebut bersifat positif maupun negatif. Hal ini juga diperparah dengan sikap negara-negara barat yang menunjukkan kekhawatiran yang besar terhadap kebangkitan kekuatan ummat Islam, termasuk di Indonesia. Kekuatan yang sewaktu-waktu dapat saja menggantikan kekuatan global yang mereka pegang saat ini. Sehingga mereka selalu ingin mengintervensi berbagai hal yang ingin dilakukan oleh ummat Islam.

¹¹ Weber di dalam Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1994), hal. 477.

POSISI PEREMPUAN DALAM DINAMIKA SOSIAL POLITIK UMAT ISLAM INDONESIA

Dalam keadaan yang serba penuh dengan pergolakan sosial politik ini, perempuan menjadi sasaran yang empuk untuk dijadikan dasar bagi terjadinya perang argumentasi maupun aksi. Keadaan perempuan, perilaku yang mereka tampilkan, kegiatan yang mereka lakukan menjadi bahan perdebatan yang hangat. Perempuan seolah dijadikan sebagai alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam, dan dalam menghadapi pengaruh barat. Kenapa bisa seperti ini?

Menurut penulis ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu ideologi gender. Ideologi yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior, dan laki-laki pada posisi yang superior. Sehingga, jika terjadi kemajuan pada perempuan yang menyebabkan posisinya bisa sejajar dengan laki-laki, maka akan muncul ketakutan yang besar pada pihak laki-laki. Ketakutan bahwa posisi superiornya akan berkurang. Mereka yang menganut ideologi ini, tidak akan senang pada kemajuan yang diperoleh perempuan. Ideologi gender ini melahirkan budaya yang sangat mengagungkan peran laki-laki, yang juga dikenal dengan budaya patriarki, budaya yang menempatkan

laki-laki sebagai pengambil keputusan tertinggi.

Tidak bisa dipungkiri, sejarah memang menunjukkan bahwa baik dalam masyarakat Islam maupun barat, posisi perempuan di dalam keluarga maupun di masyarakat memang lebih lemah. Di zaman jahiliah, zaman sebelum diangkatnya nabi Muhammad menjadi rasul, anak perempuan yang lahir bahkan harus dibunuh. Meskipun Rasulullah Muhammad SAW telah berhasil mengubah pandangan masyarakat Arab saat itu, untuk menempatkan perempuan pada posisi yang sama pentingnya dengan laki-laki, dalam sikap maupun tutur katanya, namun tampaknya belum berhasil secara keseluruhan menghapuskan ideologi gender dan budaya patriarki yang sudah tertanam sangat lama di benak masyarakat Makkah. Posisi superior laki-laki dan inferior perempuan terus menerus disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga menjadi sesuatu yang diyakini sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan.

Namun, seperti yang penulis jelaskan, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat membawa perubahan pada posisi perempuan. Perempuan telah memperoleh kesempatan yang luas untuk berpartisipasi di dalam membangun masyarakat dalam berbagai bidang. Mereka bisa menunjukkan prestasi yang

sangat bagus yang tidak kalah dengan prestasi laki-laki yang sudah sekian lama mendominasi. Bahkan tidak jarang perempuan mengukir prestasi yang mampu melebihi apa yang diraih laki-laki. Akibatnya, kekuasaan dan superioritas yang sudah sekian lama dinikmati oleh laki-laki, keistimewaan yang mereka terima dari masyarakat menjadi tergugah. Laki-laki akan kehilangan sebahagian hak-hak istimewanya. Tentulah dia akan berusaha mempertahankan hak-hak istimewa tersebut.

Terkadang mereka yang merasa terganggu ini, kemudian menggunakan ajaran Islam sebagai landasan kebenaran atau sumber argumentasi bagi sikap mereka, untuk menghalangi kemajuan yang dialami oleh perempuan. Akhirnya yang terbaca oleh masyarakat, seolah-olah perempuan yang aktif di berbagai institusi di masyarakat sudah menjauh dari ajaran agama, seolah-olah Islam menjadi penghalang bagi kemajuan perempuan, penghalang bagi partisipasi perempuan yang lebih maksimal untuk pembangunan ummat.

Hal ini kemudian mengakibatkan pandangan yang sangat unik dan membingungkan di masyarakat. Perempuan boleh memperoleh penghasilan, tetapi penghasilannya hanya merupakan penghasilan tambahan. Perempuan boleh masuk ke berbagai

bidang, tetapi mereka tidak boleh menjadi pemimpin utama di lembaga-lembaga yang menaungi bidang-bidang tersebut. Perempuan boleh berkarir tetapi posisinya tidak boleh melebihi posisi laki-laki, dan seterusnya. Kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya menjadi bingung, apa saja sebetulnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Apakah Islam hanya mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Bagaimana dengan laki-laki? Apakah benar bahwa Islam hanya mengangungkan peran dan posisi laki-laki? Apakah kalau perempuan berani berjuang untuk mensejajarkan dirinya dengan laki-laki, dia lantas telah melanggar ajaran Islam? Ideologi gender memang masih sangat kuat terbenam di benak masyarakat, tidak mudah untuk diubah. Ideologi ini menempatkan perempuan pada posisi yang serba salah. Ideologi ini menempatkan perempuan menjadi mereka yang diajak ketika dibutuhkan, dan disingkirkan ketika sudah tidak dibutuhkan, *hired when needed, fired when unneeded*.

Memang ada sebahagian perempuan yang aktif di luar rumah, bukan mengerjakan hal-hal yang positif, tetapi sebaliknya. Mereka berbuat maksiat. Mengerjakan hal-hal yang merugikan diri dan keluarganya, juga masyarakat. Tetapi berapa banyakkah dari perempuan yang beraktifitas di luar rumah yang berbuat

seperti itu. Apakah hanya di luar rumah saja bisa terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama? Tentu diperlukan pemikiran yang lebih terbuka lagi tentang anggapan-anggapan seperti ini. Gunakanlah pendekatan-pendekatan yang menyeluruh, agar bisa diketahui keadaan yang sesungguhnya.

Al Qur'an dan Hadits tentu menjadi sumber rujukan dalam perbincangan tentang peran, hak, kewajiban, dan jenis aktifitas perempuan. Begitu juga pandangan ulama. Merekalah yang bertugas menjelaskan makna Al Qur'an dan Hadits tersebut kepada masyarakat, sekaligus memberi petunjuk teknis bagaimana melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Karenanya cara pandang ulama terhadap peran perempuan akan mempengaruhi pemaknaan yang diberikannya terhadap ayat-ayat AlQur'an dan Hadits. Jika ulama memandang perempuan sebagai mereka yang sejajar posisinya dengan laki-laki, dia akan menjelaskan makna Al Qur'an dan Hadits yang membicarakan tentang hal itu. Namun sebaliknya, jika ulama menempatkan perempuan dalam posisi yang harus lebih rendah dari laki-laki, maka dia akan menjelaskan makna Al Qur'an dan Hadits sesuai dengan pandangannya tersebut.

Selain itu, pandangan tentang peran perempuan ini juga berkaitan dengan

kompleksitas sosial politik yang terjadi pada konteks keadaan atau situasi di waktu tertentu, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Perempuan bisa menjadi sangat diagungkan perannya, di dorong-dorong oleh penguasa untuk maju jika mereka sedang membutuhkan suara perempuan untuk mendukung mereka. Perempuan juga tiba-tiba akan disingkirkan jika sudah tidak dibutuhkan, atau jika dianggap menjadi penghalang kesuksesan memperoleh kekuasaan. Perempuan menjadi sasaran empuk bagi perdebatan-perbedaan pandangan sosial politik yang ada di masyarakat. Cukup sering Islam digunakan untuk mendukung pandangan-pandangan mereka yang ingin memperoleh kekuasaan. Mari kita lihat contoh kompleksitas sosial politik tersebut dalam contoh-contoh kasus di bawah ini.

Mungkin pembaca masih ingat saat awal reformasi berlangsung. Saat ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri memperebutkan posisi sebagai Presiden RI yang ke 4 di DPR RI pada tahun 1999. Megawati berasal dari PDIP yang memenangkan suara terbanyak pada Pemilu (33,7% dari total suara). Akan tetapi, suara tersebut belum mampu meraih mayoritas kursi di DPR RI. PDIP hanya mampu memperoleh 153 dari total 500 kursi. Sedangkan Gus Dur berasal dari PKB yang memenangkan 12,6% dari total suara Pemilu dengan

perolehan kursi di DPR RI sebanyak 51 kursi.¹² Yang terjadi adalah, bukan Megawati yang berhasil terpilih menjadi presiden tetapi Gus Dur. Saat itu pemilihan presiden masih dilakukan di DPR RI. Partai-partai peserta Pemilu lainnya kemudian berkoalisi untuk bisa memenangkan Gus Dur. Salah satu jargon yang dikemukakan oleh para anggota DPR RI, yang mayoritasnya memang laki-laki, pada saat itu adalah perempuan tidak boleh menjadi pemimpin negara. Itu bertentangan dengan Islam. Seruan Allahu Akbar begitu keras terdengar di gedung DPR RI saat nama Gus Dur muncul sebagai pemenang.

Anehnya pandangan mereka, para politisi laki-laki tersebut kemudian berubah ketika mereka tidak bisa mengontrol Gus Dur dalam menjalankan pemerintahan. Mereka kemudian memutuskan untuk melengserkannya. Mereka lalu dengan suara bulat memilih Megawati menggantikan Gus Dur. Mereka terlihat lupa, seolah tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi.

Penggunaan Islam sebagai alat pendukung keinginan berkuasa, untuk menghancurkan lawan politik juga dialami

oleh istri calon presiden dan wakil presiden. Ingatlah bagaimana Ibu Kristiani Herrawati Yudhoyono yang sempat dikatakan sebagai non-muslim menjelang pemilihan presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) langsung yang pertama tahun 2004. Dinamanya ada kata Kristiani yang dianggap hanya cocok untuk mereka yang beragama Kristen. Begitu juga dengan ibu Herawati Boediono yang suaminya menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2009.¹³ Dia diisukan sebagai seorang non-muslim. Ibu Herawati kemudian membantahnya dengan mengatakan dia dan keluarganya sholat lima waktu setiap hari. Memang kedua ibu ini tidak mengenakan jilbab, pakaian perempuan muslimah yang semakin marak penggunaannya saat ini. Akan tetapi dapatkah dibenarkan cara kita menuduh semua perempuan yang tidak mengenakan jilbab sebagai non-Muslim? Pastilah tidak semua Muslim berpandangan seperti itu. Tetapi karena berada dalam suasana memperebutkan kekuasaan, berbagai carapun dilakukan. Perempuan menjadi media yang ampuh bagi mereka yang ingin memperoleh kekuasaan untuk melemahkan lawannya. Media massa membantu menyebarluaskan pandangan miring pada

¹² KPU, *Pemilu 1999*, www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999, diakses pada 17 Desember 2014.

¹³ Amri, Arif Bambani dan Ayatullah Humaeni, *Herawati Boediono: Saya Salat Lima Waktu*, Vivanews 24 Juni 2009, m.news.viva.co.id/news/read/69573-herawati_boediono_saya_salat_lima_waktu, diakses 6 Desember 2014.

perempuan-perempuan yang terlibat dalam pertarungan memperoleh kekuasaan. Islam digunakan sebagai tameng bagi pembena pandangan-pandangan pribadi orang-orang tertentu. Akibatnya masyarakat menjadi bingung, apakah benar Islam memandang rendah pada perempuan?

Keadaan yang hampir sama juga terjadi pada Ibu Susi Pudjiastuti yang berpenampilan berbeda dengan perempuan Muslim pada umumnya. Ketika presiden Indonesia yang ke tujuh, Joko Widodo, mengumumkan Ibu Susi Pudjiastuti menjadi salah seorang menteri dalam kabinetnya, yaitu sebagai menteri Kelautan dan Perikanan, mata halayak terutama wartawan, langsung tertuju pada penampilan fisiknya. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan beliau diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gayanya yang dianggap kelaki-lakian (dalam bahasa gaulnya disebut tomboy), kebiasaannya merokok, dan kakinya yang bertato, menjadi topik pembicaraan yang hangat di berbagai media: televisi, koran, dan internet. Yang menanyakan apa agamanya, tidak kalah banyaknya.

Tidak hanya itu, kapasitas intelektualnya juga dipertanyakan. Masyarakat meragukan kemampuannya memimpin dan mengelola kementerian tersebut karena tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dia putus sekolah ketika berada di bangku sekolah menengah atas

(SMA). Sehingga, pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah sekolah menengah pertama (SMP).

Singkatnya, media menggambarkan Ibu Susi sebagai sosok yang tidak sesuai dengan idealisme yang diharapkan masyarakat dari seorang perempuan, baik itu berdasarkan pada tradisi masyarakat Indonesia atau masyarakat Muslim dimana Ibu Susi dibesarkan. Merujuk pada perkembangan masyarakat Muslim Indonesia saat ini, yang salah satu indikatornya yang mudah dilihat adalah semakin banyaknya perempuan yang memakai busana Muslim untuk menutup auratnya, maka penampilan Ibu Susi dapat juga dianggap tidak sesuai dengan pandangan Islam.

Belakangan, setelah banyak mengungkapkan sisi yang dianggap negatif dari beliau, baru disebutkan juga prestasi-prestasi yang diraihinya. Dia adalah siswa yang sangat cerdas di sekolahnya. Dia sudah melahap buku-buku filsafat dan buku berbahasa Inggris saat SMA. Hal yang kurang biasa dilakukan oleh para remaja waktu itu.¹⁴ Dia adalah seorang pengusaha yang memulai bisnisnya sebagai pengepul ikan di pasar lalu berhasil mengekspor ikan, termasuk *lobster*, ke negara-negara Asia bahkan

¹⁴ TV One, 6 Desember 2014, *Satu Jam Lebih Dekat Susi Pudjiastuti*

Amerika.¹⁵ Dia juga pemilik perusahaan penerbangan Susi Air yang mengoperasikan tidak kurang dari 50 buah pesawat ke berbagai daerah di Indonesia yang sulit dijangkau dengan transportasi darat.¹⁶ Pesawatnya adalah pesawat pertama yang mendarat di Meulaboh, Aceh pada saat bencana tsunami terjadi pada tahun 2004.¹⁷ Dia juga penyandang dana utama bagi pembangunan Masjid Agung di kampung halamannya Pangandaran, Jawa Barat.¹⁸ Begitulah, tidak mudah bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah di masyarakat dengan leluasa. Pandangan-pandangan negatif tentang mereka sering sekali di tonjalkan. Islam selalu digunakan untuk mensupport pandangan negatif tersebut. Padahal tentu tidak demikian adanya.

Informasi-informasi negatif yang diberikan oleh media tentang perempuan yang aktif di dunia publik tentu

mempengaruhi pandangan masyarakat kepada mereka. Tidak ada jaminan apakah pandangan negatif tersebut akan hilang begitu saja. Masyarakat sudah terlanjur mengkonsumsi berita yang tidak berimbang. Gerak-gerik perempuan di dunia publik terus menjadi sorotan. Sehingga, perempuan yang banyak beraktivitas di masyarakat harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa pandangan negatif tentang dirinya tidaklah benar. Dia harus membuktikan bahwa dia mampu menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan baik. Jika dia gagal, maka kegagalannya tidak hanya berdampak pada dirinya juga pada perempuan lainnya. Masyarakat dengan mudah akan mengatakan sudah terbukti perempuan memang tidak memiliki kemampuan yang baik. Apalagi untuk bidang politik, menjadi pemimpin yang berkuasa.

Anggapan bahwa perempuan tidak mampu dan tidak sehebat laki-laki dalam memimpin masih melekat pada benak masyarakat. Kepemimpinan perempuan bahkan dinilai tidak muncul secara murni dari dirinya sendiri. Masyarakat akan mencari siapa orang dekatnya, ayahnya, suaminya. Bagi masyarakat, orang-orang dekat di sekitarnya inilah yang sebenarnya berperan menjadikan perempuan sebagai pemimpin, bukan kemampuan dirinya.

¹⁵ Kantor Berita Resmi, 31 Oktober 2014, *Profil Biografi dan Biodata Susi Pudjiastuti*, beritaresmi.com/profil-biografi-dan-biodata-susi-pudjiastuti.html, diakses pada 6 Desember 2014.

¹⁶ *Tribunnews.com*, 4 Desember 2014, *Kabinet Jokowi JK: Menteri Susi Miliki Harta Lebih Dari Rp 1 Triliun*, m.tribunnews.com/nasional/2014/12/04/menteri-susi-miliki-harta-lebih-dari-rp-1-triliun, diakses pada 7 Desember 2014.

¹⁷ *Kompas.com*, 24 November 2014, *Kenangan Menteri Susi Menghadapi Tsunami*, bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/24/105042826/Kenangan.Menteri.Susi.Menghadapi.Tsunami, diakses 3 Desember 2014.

¹⁸ *Kompas.com*, 30 Oktober 2014, *Susi Pudjiastuti Juga Bangun Masjid Besar di Pangandaran*, regional.kompas.com/read/2014/10/30/08300001/Susi.Pudjiastuti.Juga.Bangun.Masjid.Besar.di.Pangandaran, diakses pada 7 Desember 2014.

Padahal hal yang sama juga terjadi pada laki-laki.

Masyarakat memberikan standard ganda (*double standard*) kepada perempuan yang berkecimpung di ranah publik, terlebih lagi di panggung politik. Sehingga, perempuan yang berada dalam jabatan politik harus melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa baru masyarakat bisa mengakui kemampuannya. Tanpa disadari, masyarakat sebenarnya menginginkan persyaratan yang lebih tinggi bagi perempuan untuk bisa menjadi pemimpin di ranah publik dibandingkan dengan yang mereka persyaratkan bagi laki-laki.

Tetapi tidak demikian halnya dengan bidang-bidang lainnya, bidang sosial dan kemasyarakatan. Perempuan akan diajak untuk berpartisipasi membantu fakir miskin, mencerdaskan masyarakat, mengawal moralitas generasi muda, meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan, kebersihan dan kelestarian lingkungan, membantu pemerintah mensosialisasikan program-programnya, dan lain-lain. Masyarakat akan dengan senang menerima perempuan yang menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, bahkan mendorong keterlibatan mereka secara lebih intensif.

Ibu Susi Pudjiastuti tidak mendapat sorotan negatif yang besar dari masyarakat ketika masih menjadi pedagang ikan

bahkan ketika telah memiliki pesawat. Masyarakat bahkan memujinya karena banyak membantu nelayan, apalagi ketika menolong mereka yang tertimpa bencana tsunami di Aceh. Setelah dia menjadi menteri, dengan informasi dari media, masyarakat kemudian menyorotinya secara lebih teliti. Menteri adalah jabatan politik yang penting, satu level di bawah jabatan presiden. Seorang menteri akan menjadi pemimpin tertinggi di kementerian yang dipercayakan kepadanya. Jabatan ini memiliki tingkat '*prestigious*' yang sangat tinggi.

Pada bidang-bidang lain pun, termasuk organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan tetap tidak akan mudah bagi perempuan untuk menduduki posisi pimpinan tertinggi. Pembaca tentu dapat memperhatikan bahwa perempuan pada umumnya menjabat sebagai pemimpin pada organisasi-organisasi perempuan. Apakah organisasi itu otonom atau berafiliasi dengan organisasi lainnya. Dalam sejarah, organisasi wanita yang ada di Indonesia pada umumnya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari organisasi yang dibentuk oleh laki-laki. Organisasi wanita pertama di Indonesia, Putri Merdeka yang berdiri pada tahun 1912 adalah bahagian dari organisasi nasionalis pertama Budi Utomo yang

berdiri pada tahun 1908.¹⁹ Begitu juga dengan organisasi-organisasi lainnya seperti Aisyiah yang berdiri pada tahun 1917 merupakan bagian dari Muhammadiyah, dan Serikat Putri Islam yang merupakan organisasi wanita yang merupakan bagian dari Serikat Islam, didirikan pada tahun 1925.²⁰ Tetap sulit bagi perempuan untuk menjadi pemimpin tertinggi pada organisasi-organisasi yang keanggotaannya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka hanya diperkenankan untuk menjadi pemimpin pada level organisasi perempuan. Di organisasi Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak tercantum nama perempuan dalam unsur pimpinannya, karena perempuan sudah difasilitasi untuk memiliki organisasi sendiri seperti Muslimat dan Aisyiah. Organisasi-organisasi ini merupakan sayap dari organisasi induknya.

Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa masyarakat keberatan jika perempuan memasuki dunia politik? Mengapa masyarakat sulit menerima perempuan menjadi pemimpin pada sebuah lembaga atau organisasi? Padahal sudah banyak perempuan yang berkecimpung diberbagai bidang di ranah

publik. Apakah benar Islam juga menghalangi kiprah perempuan untuk maju sampai ke puncak karir di masyarakat? Bagaimanakah sebenarnya konsep relasi gender dalam Islam? Dalam pandangan penulis, bukan masyarakat secara umum yang takut pada kiprah perempuan, bukan pula Islam menghambat perempuan berkontribusi bagi pengembangan ummat. Namun ada sekelompok orang yang egois, yang menginginkan kekuasaan hanya terpusat pada diri dan kelompoknya. Mereka bahkan tidak segan menggunakan Islam sebagai alat pendukung keinginan-keinginannya.

Namun demikian, tentu perlu dilakukan penelitian yang luas dan mendalam untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa jadi pandangan penulis sangat subjektif. Bagi penulis, ketidakseimbangan peran laki-laki dan perempuan, ketidakseimbangan gender merupakan faktor yang penting dalam menjelaskan hal ini. Misalnya, sebagaimana diketahui, politik berkaitan langsung dengan kekuasaan dan otoritas. Mendapatkan kekuasaan tentulah bukan hal yang mudah. Mereka yang ingin mendapatkan kekuasaan biasanya akan berjuang dengan sekuat tenaga, pikiran, bahkan uang. Karenanya, politik menjadi dunia yang sangat keras. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai dunia yang kotor

¹⁹ Martyn, Elizabeth, *The Women's Movement in Post-colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy* (New York: Routledge Curzon, 2005), hal. 39.

²⁰ Wieringa, Saskia, *Sexual Politics in Indonesia* (London: Routledge, 2002), hal. 66.

(*dirty world*). Segala cara bisa dilakukan seseorang untuk memperoleh kekuasaan, termasuk cara-cara yang keji seperti kampanye hitam (*black campaign*). Perempuan yang dipandang masyarakat sebagai mereka yang bersifat lemah lembut, dianggap tidak cocok memasuki bidang ini.

Begitu juga dengan kepemimpinan. Masyarakat akan selalu merujuk pada konteks keluarga. Di dalam sebuah keluarga yang menjadi kepala keluarga adalah ayah (laki-laki). Sehingga, ini juga ingin diterapkan dalam konteks masyarakat, di ranah publik. Sering sekali ajaran agama dijadikan sebagai argumen pendukungnya. Dalam konteks Indonesia, sebagai agama yang pemeluknya terbesar di Indonesia bahkan di dunia,²¹ Islam dianggap berkontribusi bagi terhambatnya perempuan untuk memasuki dunia politik dan menduduki posisi sebagai pimpinan tertinggi di dalam berbagai lembaga pemerintah maupun swasta atau organisasi sosial kemasyarakatan ini. Al Qur'an (QS 4:34) selalu menjadi rujukan untuk menunjukkan bahwa laki-lakilah yang berhak menjadi pemimpin. Laki-laki

memiliki kelebihan dibandingkan dengan perempuan. Mereka lebih berani, kuat, dan rasional dibandingkan dengan perempuan.

Meskipun sudah ada pandangan yang berbeda tentang makna pimpinan dalam ayat ini,²² sebahagian masyarakat tetap tidak menyetujui perempuan menjadi pimpinan tertinggi pada satu lembaga atau organisasi. Sehingga, perempuan di Indonesia, khususnya yang beragama Islam selalu berada dalam situasi yang dilematis. Ingin maju mencapai karir yang tinggi, tetapi takut jika dianggap melanggar aturan agama. Belum lagi jika mereka kemudian dianggap sebagai penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemerosotan moralitas atau akhlak generasi muda. Menurut Eickelman dan Piscatori dalam Sally White, terjadinya divisi antara mereka yang menyetujui dan tidak menyetujui berkiprahnya perempuan secara utuh pada ranah publik adalah karena penekanan pada pentingnya peran keluarga sebagai fondasi dari masyarakat dan sebagai tempat sosialisasi ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, menurut Sally White ada konteks sejarah yang melekat pada

²¹ Untuk penjelasan lebih lengkap tentang jumlah penduduk muslim di Indonesia dan perbandingannya dengan jumlah penduduk muslim di dunia lihat Fealy, Greg, Virginia Hooker, and Sally White, "Indonesia", in Greg Fealy and Virginia Hooker (eds), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*, (Singapore:ISEAS, 2006), hal. 39-50.

²² Menurut Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta, Paramadina, 1999), hal 150, Abdullah Yusuf Ali menterjemahkan kata qawwamun dalam ayat ini sebagai pelindung (protectors, maintainers). Akan tetapi Departemen Agama RI menterjemahkannya dengan pemimpin. Ayat ini tidak tepat untuk dijadikan alasan sebagai alasan untuk tidak menyetujui perempuan menjadi pemimpin.

kenyataan ini. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda memberikan otonomi kepada ummat Islam untuk membuat hukum keluarga. Otonomi ini merupakan satu diantara sedikit otonomi yang diberikan kepada ummat Islam. Akibatnya, hukum keluarga ini kemudian menjadi lahan bagi ummat Islam untuk menunjukkan resistensi mereka terhadap penjajah, resistensi terhadap tendensi menjadi sekuler seperti yang ditunjukkan oleh elite-elite yang berpendidikan Barat pada waktu itu, sekaligus sebagai penekanan terhadap identitas Muslim. Bahkan sampai sekarang hukum keluarga Islam tetap ingin mempertahankan simbol-simbol ini.²³

Tentu saja, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kekuasaan dan ideologi yang dianut oleh penguasa yang sedang memegang tampuk pemerintahan pada saat itu. Jika penguasanya merupakan orang yang berpandangan luas, memandang perempuan sebagai mitra kerja yang sejajar, maka berbagai kesempatan akan diberikan kepada perempuan. Sehingga mereka bisa mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan sulit bagi

perempuan untuk berkembang dengan maksimal.

CAPAIAN-CAPAIAN PEREMPUAN PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT

Banyaknya masalah yang dihadapi perempuan dalam mengekspresikan potensi mereka di masyarakat, ternyata tidak membuat mereka lemah dan berputus asa. Banyak dari mereka yang bisa mencapai prestasi yang baik. Dalam bidang sosial dan politik, para perempuan secara individu maupun berkelompok telah melakukan banyak sekali kegiatan, melalui organisasi perempuan maupun organisasi yang bergabung dengan organisasi laki-laki. Organisasi bentukan pemerintah maupun masyarakat. Sejak dahulu, dari masa ke masa perkembangan sejarah Indonesia, para perempuan Indonesia tidak hanya berdiam diri. Seperti halnya kaum laki-laki mereka ingin turut serta membangun masyarakat, membangun negaranya. Mereka adalah bagian dari masyarakat.

Pada masa perjuangan memperoleh kemerdekaan, dikenal nama-nama para pahlawan nasional perempuan seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Martha Christina Tiahahu, Nyai Ageng Serang.²⁴ Mereka ini

²³ White, Sally, "Gender and the Family", in Greg Fealy and Virginia Hooker (eds), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*, (Singapore: ISEAS, 2006), hal. 273-352.

²⁴ Suryochondro, Sukanti, "Timbul dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia:", dalam T.O. Ihromi (ed), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 39.

menjadi inspirasi bagi perjuangan perempuan-perempuan aktifis selanjutnya. Seiring dengan terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan seperti Budi Oetomo dan Syarikat Islam, perempuan juga ikut bergabung di dalamnya. Menurut Robinson pada tahun 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta. Ada 30 organisasi wanita yang ikut di dalam kongres ini, semuanya adalah bagian dari organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan. Kongres ini merupakan momentum penting bagi perkembangan gerakan wanita selanjutnya di Indonesia, karena dengan ini jaringan antara aktivis wanita semakin kuat untuk memperbaiki kondisi perempuan Indonesia dan masyarakat pada umumnya. Pentingnya kongres perempuan ini terefleksikan dengan diambilnya tanggal diadakannya kongres ini yaitu 22 Desember sebagai Hari Ibu, yang merupakan salah satu hari perayaan nasional.²⁵ Dengan demikian, perayaan hari Ibu berbeda maknanya dengan perayaan hari Ibu di negara-negara lainnya. Di Indonesia perayaan hari Ibu adalah untuk memperingati keikutsertaan para ibu memperjuangkan kemerdekaan dan membangun negaranya.

²⁵ Robinson, Kathryn, "Indonesian Women's Rights, International Feminism, and Democratic Change dalam *Communal/Plural* (Vol. 6 No. 2, 1998), hal. 208.

Para aktivis gerakan perempuan di Indonesia bersama-sama dengan gerakan nasionalis terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Ada yang tergabung di dalam Lasykar Wanita Indonesia (Laswi) yang dibentuk pada tahun 1945. Anggota Laswi ini melakukan banyak hal seperti merawat tentara yang luka, memasak makanan, dan menjahitkan baju seragam para tentara.²⁶ Pada masa-masa awal kemerdekaan ini dua orang wanita diangkat menjadi menteri di dalam kabinet, yaitu Maria Ulfah Subadio sebagai menteri sosial, yang menjabat pada Maret 1947 sampai Juni 1947, dan Trimurti sebagai Menteri Tenaga Kerja, menjabat pada Juli 1947 sampai dengan Januari 1948.²⁷

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, para aktivis perempuan terus berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat. Mereka ikut bergabung dalam partai-partai politik yang didirikan oleh laki-laki. Ada 12 organisasi wanita yang bergabung dengan partai politik. Organisasi-organisasi tersebut adalah: Women Demokrat Indonesia, bergabung dengan Partai Nasional Indonesia; Gerwani dengan Partai Komunis Indonesia; Gerakan Wanita Sosialis

²⁶ Wieringa, Saskia, *Sexual Politics in Indonesia* (London: Routledge, 2002), hal. 83.

²⁷ Martyn, Elizabeth, *The Women's Movement in Post-colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy* (New York: Routledge Curzon, 2005), hal. 49.

dengan Partai Sosialis Indonesia; Persatuan Wanita Murba dengan Partai Murba; Wanita Nasional dengan Partai Rakjat Nasional; Wanita Indonesia dengan Partai Indonesia Raya; Parkiwa dengan Partai Kebangsaan Indonesia; Muslimat dengan Masjumi; Gerakan Wanita PSII dengan Partai Sjarikat Islam Indonesia; Muslimat Nahdlatul Ulama dengan Nahdlatul Ulama; Persatuan Wanita Kristen Indonesia dengan Parkindo; dan Wanita Katolik dengan Partai Katolik.²⁸ Ada juga kelompok aktifis perempuan yang mendirikan partai sendiri, Partai Wanita Rakyat, didirikan pada 6 September 1946. Partai ini menjadi salah satu peserta pada pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Pemilu ini menghasilkan 17 orang perempuan duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat nasional. Akan tetapi, Partai Wanita Rakyat tidak berhasil memperoleh kursi dalam pemilu ini.²⁹

Pada masa pemerintahan presiden Suharto (1966-1998), terjadi pengurangan jumlah partai-partai politik. Secara otomatis, para aktivis perempuan yang masih ingin berkecimpung di dalam dunia

politik harus bergabung dalam partai-partai politik yang baru yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Namun Suharto hanya mendukung partai Golkar. Partai ini selalu menjadi pemenang Pemilu dalam masa pemerintahan Suharto.

Pada masa ini, partisipasi perempuan di dalam pembangunan sangat didukung. Akan tetapi partisipasi tersebut dibatasi lebih kepada sebagai pengawal moralitas masyarakat. Peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan istri. Jadi meskipun mereka bekerja mencari nafkah, mereka tidak boleh melupakan tugas utama sebagai ibu dan istri tersebut. Status sebagai ibu dan istri ini juga tercermin dalam organisasi-organisasi wanita yang dibentuk pemerintah seperti Dharma Wanita (organisasi istri-istri pegawai negeri) dan Dharma Pertiwi (organisasi istri-istri angkatan bersenjata). Di organisasi ini, posisi anggota di dalam strukturnya bergantung pada posisi para suami mereka. Istri seorang menteri, misalnya, akan langsung menjadi ketua Dharma Wanita di kementerian tersebut. Pendidikan istri, kemampuan organisasi tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pengangkatan pengurus organisasi ini. Hanya posisi atau jabatan suaminya yang

²⁸ Woodsmall di dalam Martyn, Elizabeth, *The Women's Movement in Post-colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy* (New York: Routledge Curzon, 2005), 49. Martyn 2005) hal. 109.

²⁹ Kementerian Penerangan, *Kepartaian dan Parlemenaria Indonesia* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1954).

menentukan posisinya di dalam organisasi ini.³⁰

Dalam kondisi seperti ini, posisi perempuan dalam dunia publik khususnya politik menjadi sangat tergantung pada posisi suami mereka. Sebahagian besar anggota DPR/D adalah para istri perwira tinggi dan pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga pemerintah. Pemerintahan Soeharto melegitimasi ranah domestik menjadi tempat utama perempuan sekaligus menegaskan stratifikasi diantara para perempuan (tentu juga masyarakat pada umumnya).

Namun kesulitan untuk berkiprah di bidang politik tidak menyurutkan keinginan para aktifis perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu memperbaiki kehidupan perempuan dan masyarakat. Penelitian-penelitian tentang gender dan kaitannya dengan agama, kurikulum pendidikan, media, dan lain-lain juga dilakukan. Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada masalah-masalah perempuan juga didirikan seperti Katyanamitra dan Yayasan Solidaritas Perempuan di Jakarta dan Yasanti serta Rifka Annisa di Yogyakarta juga melakukan banyak kegiatan berkaitan dengan relasi gender.

³⁰ Suryakusuma, Julia I, "The State and Sexuality in New Order Indonesia", di dalam Laurie J Sears (ed), *Fantasizing the Feminine in Indonesia* (Durham: Duke University Press, 1996), hal. 99.

Para perempuan akademisi juga melakukan berbagai kegiatan dan penelitian. Mendirikan pusat-pusat studi wanita (PSW) di kampus mereka. Menurut Rahardjo, pada tahun 1995, ada 24 PSW di universitas-universitas negeri di seluruh Indonesia.³¹ Saat ini hampir semua universitas negeri dan swasta memiliki PSW. Bahkan sudah ada dua universitas negeri di Indonesia yang membuka program studi wanita untuk tingkat magister, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin.³²

Berakhirnya pemerintahan Suharto pada 21 Mei 1998, membawa perubahan baru bagi pergerakan wanita di Indonesia. Para aktivis perempuan berjuang untuk menambah jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat nasional maupun di daerah. Dalam pandangan mereka jumlah populasi perempuan yang merupakan separuh dari total penduduk di Indonesia haruslah terwakili secara proporsional di lembaga pembuatan kebijakan ini. Dengan demikian kebutuhan-kebutuhan perempuan dapat terartikulasikan dengan baik. Apalagi para

³¹ Rahardjo, Yulfita, "Perbedaan antara Studi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita, dalam T.O. Ihromi (ed), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 11.

³² Sadli, Saparinah, "Feminism in Indonesia and in International Context", dalam Kathryn Robinson dan Sharon Bessell (eds), *Women in Indonesia: Gender, Equity, and Development* (Singapore: ISEAS, 2002), hal. 81.

aktifis perempuan memiliki andil yang besar pada keruntuhan rezim Suharto. Gerakan Suara Ibu Peduli yang berdemonstrasi di bundaran Hotel Indonesia, yang terkenal dengan sebutan “demo susu” untuk memprotes mahalnnya harga susu untuk anak, telah mengawali demonstrasi-demonstrasi selanjutnya untuk menggulingkan pemerintahan Suharto.³³

Di masa reformasi sekarang ini, para aktifis perempuan lebih bersemangat lagi memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan perempuan, karena saat ini masyarakat Indonesia benar-benar memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, membentuk organisasi. Para aktifis perempuan yang tergabung di dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, pusat-pusat studi wanita, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, partai-partai politik, dan DPR/D melakukan berbagai aktifitas yang dapat membantu memperbaiki kehidupan perempuan, dan masyarakat Indonesia secara umum.

Dalam bidang politik, para aktivis perempuan telah berhasil memperjuangkan tercantumnya kuota sebesar 30% untuk

calon anggota DPR/D perempuan.³⁴ Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan jumlah perempuan di lembaga pembuat kebijakan ini. Pro dan kontra mewarnai hadirnya kuota ini. Banyak hambatan yang dihadapi para perempuan politisi dalam implementasi kuota ini oleh partai-partai politik. Peraturan tentang kuota inipun berubah-ubah dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Sampai pada pemilu 2014 pada April yang lalupun, impian untuk mendapatkan jumlah anggota DPR/D perempuan sebesar 30% dari total kursi di DPR/D belum juga tercapai. Bahkan untuk anggota DPR, jumlah perempuan pada periode 2014-2019 ini lebih rendah dari periode sebelumnya. Pada periode 2009-2014, jumlah perempuan di DPR RI adalah 100 dari 560 orang total anggota (17,9%). Pada periode sekarang ini jumlahnya menjadi 97 orang (17,3%). Memang hambatan di bidang politik lebih besar dari bidang lainnya.

Dalam pandangan penulis, selain menganggap dunia politik adalah dunia yang keras sehingga tidak banyak perempuan yang mau memasukinya, ada beberapa penyebab lainnya. Pertama,

³³ Oey-Gardiner, Mayling, “And The Winner is... Indonesia Women in Public Life”, dalam Kathryn Robinson dan Sharon Bessell (eds), *Women in Indonesia: Gender, Equity, and Development* (Singapore: ISEAS, 2002), hal. 110.

³⁴ Untuk penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana para aktifis perempuan memperjuangkan dicantumkan kuota pada UU Pemilu dapat dilihat pada Wahidah Siregar, *Gaining Representation in Parliament: A Study of the Struggle of Indonesian Women to Increase Their Numbers in Parliaments in the 2004 Elections*, (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010), hal 59-73.

politik berhubungan dengan pembuatan kebijakan, pengelolaan negara. Sehingga, politik akan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan hal ini, karena mereka lebih banyak berada di ranah domestik. Masyarakat juga masih menganggap bahwa perempuan adalah mereka yang lebih mengedepankan perasaan daripada rasionalitas. Sehingga mereka tidak akan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang besar, apalagi mengelola negara, sebuah entitas yang sangat luas cakupannya.

Kedua, tradisi di masyarakat memang melarang perempuan memasuki dunia politik, apalagi sampai menjadi pemimpinnya. Seperti yang telah penulis singgung sebelumnya, tradisi ini berakar dari berbagai sumber, penafsiran ajaran agama, ideologi yang diyakini, atau nilai-nilai yang sudah sangat lama dipegang teguh oleh masyarakat. Pembaca tentu pernah mendengar hadis yang disampaikan oleh pemuka agama kepada jamaahnya, bahwa negara yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan adalah negara yang sedang menunggu kehancurannya. Sayangnya, pemuka agama ini tidak memberikan penjelasan yang cukup mengapa Rasulullah mengeluarkan hadits seperti ini. Nilai-nilai yang seperti ini diturunkan dari satu

generasi umat Islam ke generasi berikutnya, sehingga begitu melekat di benak masyarakat Muslim.

Ketiga adalah keengganan individu perempuan sendiri. Mereka memang tidak tertarik dengan dunia politik atau tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk beradu argumen. Panggung politik seperti yang kita lihat di berbagai media saat ini, tidak ubahnya seperti panggung debat kusir. Para politisi berdebat sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan sampai beradu fisik, menghabiskan banyak waktu dan tenaga tanpa menghasilkan keputusan yang berarti, keputusan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Hanya sedikit perempuan yang memiliki keberanian untuk memasuki bidang ini.

Keempat, banyaknya pekerjaan domestik yang harus ditangani, membuat perempuan tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkecimpung di dunia politik yang seolah-olah bekerja tanpa batas waktu yang jelas. Di dalam sebuah keluarga di Indonesia, sangat umum jika ibu adalah mereka yang lebih dahulu bangun dan lebih akhir tidur, yang memasak tetapi makan belakangan, yang mengerjakan berbagai pekerjaan rumah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang di waktu akan tidur masih memikirkan apa yang harus dimasak untuk keluarganya esok hari. Sehingga, mereka

harus memastikan ada waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas di rumah tangganya tersebut.

Kelima, perempuan tidak memiliki kekuatan ekonomi. Mereka bergantung secara ekonomi pada suami. Sementara, politik memerlukan modal yang besar untuk mendulang suara rakyat. Dengan sendirinya, perempuan tidak dapat memasukinya dengan mudah. Apalagi masyarakat masih belum terdidik dengan baik secara politik. Mereka belum menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang melihat pada program-program yang ditawarkan partai-partai politik, para calon anggota DPR/D. Masyarakat masih cenderung memilih mereka yang memberi imbalan materi kepadanya.

Tentu saja, ada berbagai alasan lainnya yang bisa dikemukakan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dunia politik tidak menjadi tempat favorit bagi perempuan. Namun demikian tetap saja ada perempuan yang berani memasuki dunia politik ini, dengan berbagai alasan. Apalagi peluang untuk itu juga semakin terbuka, misalnya dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah. Kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin daerah, menjadi gubernur atau bupati/walikota sudah terbuka. Saat ini, 18 orang perempuan sudah menjadi pemimpin tertinggi di Kabupaten/Kota (3% dari

jumlah total).³⁵ Angka ini tentu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah wilayah Kabupaten/Kota tersebut, akan tetapi ini menandakan adanya kemajuan yang diperoleh perempuan dalam pentas politik Indonesia. Perempuan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kontribusinya pada pembangunan negara ini sangat besar. Masyarakat sudah mempercayai kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin mereka.

Saat ini jumlah menteri perempuan dalam cabinet yang dibentuk Presiden Jokowi juga bertambah banyak. Delapan orang dari 34 menteri (23%). Ini persentase yang sangat tinggi. Para menteri perempuan ini juga ditempatkan pada posisi-posisi yang sangat strategis. Menteri Luar Negeri, bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan, Ibu Retno Marsudi. Ini menunjukkan keterbukaan kesempatan yang lebih besar lagi bagi perempuan untuk mengekspresikan kemampuan mereka, member kemanfaatan yang lebih besar lagi bagi masyarakat.

³⁵ Misbahul Pratiwi, Andi, *UU Pilkada dan Ancaman Menyusutnya Kepemimpinan Perempuan*, Jurnal Perempuan 29 September 2014, <https://www.jurnalperempuan.org/blog-feminis-muda/uu-pilkada-dan-ancaman-menyusutnya-kepemimpinan-perempuan>, diakses 19 Desember 2014.

KESIMPULAN

Penulis telah menjelaskan bagaimana relasi gender dalam Islam dalam tinjauan sosial politik. Kata Islam dalam judul tersebut penulis maksudkan sebagai Islam yang dipraktekkan oleh ummat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari: bagaimana ummat Islam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di keluarga dan di masyarakat, bagaimana ummat Islam memberikan peran kepada masing-masing jenis kelamin, bagaimana karakter atau sifat yang dilekatkan oleh ummat Islam kepada laki-laki dan perempuan, serta bagaimana mereka memperbincangkan dan merespon aktivitas perempuan yang semakin meningkat di luar rumah, di masyarakat, di ranah publik.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Qur'an dan Hadits, sebenarnya Islam memosisikan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar kedudukannya di hadapan Allah. Jika mereka beramal, maka Allah memberi ganjaran pahala yang sama besarnya, jika mereka bertakwa, maka Allahpun menempatkan di tempat yang sama mulianya di hadapannya. Namun dalam realitasnya, dalam implementasinya, masyarakat tidak menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sejajar. Laki-laki

ditempatkan pada posisi sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki dalam posisi superior dan perempuan sebagai inferior. Keadaan ini menyebabkan kesulitan bagi perempuan untuk mengekspresikan semua kemampuan atau potensi yang mereka miliki. Padahal dengan potensi yang mereka miliki tersebut banyak sekali kemanfaatan yang bisa mereka berikan kepada masyarakat.

Penempatan perempuan dalam posisi sosial yang lebih lemah oleh ummat Islam tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor budaya, dominasi barat, kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok ummat Islam terhadap kekuasaan, ideologi gender, dan keengganan ummat Islam untuk berubah. Padahal perubahan sosial terus terjadi.

Perubahan sosial dan berbagai faktor lainnya seperti tumbuh pesatnya industri menyebabkan perempuan hadir di ranah publik. Intensitas kehadiran mereka semakin tinggi, dan jumlah mereka yang masuk ke ranah publik ini juga terus meningkat, serta bidang-bidang pekerjaan yang mereka geluti juga semakin bervariasi. Sementara itu, laki-laki juga tetap mendominasi dunia publik ini. Akibat yang mudah dilihat adalah semakin sedikitnya waktu yang diperuntukkan laki-laki dan perempuan di dalam rumah. Dampak selanjutnya adalah banyak

permasalahan-permasalahan sosial yang muncul.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan sosial yang muncul tersebut, diperlukan pendekatan-pendekatan yang menyeluruh, sehingga semua aspek yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sosial tersebut bisa diketahui. Pendekatan individu, interaksi, dan institusi dapat membantu memahaminya. Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan penggunaan berbagai teori untuk membantu memahami berbagai faktor penyebab. Sehingga, alternatif solusinya dapat ditemukan. Bagaimanapun juga, permasalahan sosial perlu diselesaikan, jika tidak dia akan membawa kesakitan pada masyarakat.

Selain itu, bagi ummat Islam, pemecahan terhadap permasalahan sosial tersebut tentulah dengan menggunakan Al Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini pemaknaan terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh kedua sumber hukum dalam Islam tersebut haruslah murni, tidak diikuti oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga keduanya bisa menjadi penyejuk dan petunjuk penyelesaian bagi berbagai permasalahan tersebut.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan dalam mengantisipasi atau memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dari perubahan peran sosial

yang dialami masing-masing. Mereka harus mendiskusikan bersama bagaimana mencari jalan keluar yang baik, yang menyenangkan, dan berkeadilan bagi semua. Kerjasama yang baik, diskusi yang berkualitas tentulah bisa dicapai jika laki-laki dan perempuan bisa saling menghargai, memandang relasi diantara mereka sebagai relasi dua orang yang setara, bukan relasi antara seorang yang mendominasi dengan seorang yang didominasi. Ketidakseimbangan relasi tentu menyebabkan mereka yang berada dalam posisi yang lemah tidak berani menyuarakan pikiran-pikiran dan pendapatnya dengan leluasa.

Tentu saja, tidak akan mudah melakukan hal ini, karena telah sekian lama laki-laki berada dalam posisi yang superior. Telah sekian lama pula perempuan berada dalam posisi yang inferior. Keduanya sudah menerima posisi masing-masing dengan pasrah, karena menganggap hal itu sebagai kodrat. Padahal tidak demikian adanya. Superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan diciptakan oleh masyarakat, hasil dari konstruksi masyarakat yang disosialisasikan secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Al Qur'an yang merupakan hidangan Ilahi tidak menempatkan laki-laki dan perempuan dalam relasi yang seperti itu. Karenanya, ummat Islam harus berusaha

untuk berubah kearah yang lebih baik. Arah yang ditunjukkan oleh Allah dan RasulNya. Sekali lagi, mungkin tidak mudah melakukannya. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an dan Terjemahnya, http://geocities.com/alquran_indo, diakses September 2003.
2. Amri, Arif Bambani dan Ayatullah Humaeni, *Herawati Boediono: Saya Salat Lima Waktu*, Vivanews 24 Juni 2009, m.news.viva.co.id/news/read/69573-herawati_boediono_saya_salat_lima_waktu, diakses 6 Desember 2014.
3. Badan Pusat Statistik, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*, sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?id=321, diakses pada 20 Desember 2014.
4. Collins Cobuild. *English Dictionary for Advanced Learners*. Glasgow: HarperCollins Publishers. 2001.
5. Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
6. Fealy, Greg, Virginia Hooker, and Sally White. "Indonesia", in *Greg Fealy and Virginia Hooker (eds), Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*. Singapore: ISEAS, 2006.
7. Gajimu.com, *Wujudkan Upah yang Setara Bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan*, m.gajimu.com/main/gaji/kesenjangan-upah, diakses pada 7 Desember 2014.
8. Giddens, Anthony, *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1993.
9. Kantor Berita Resmi, 31 Oktober 2014, *Profil Biografi dan Biodata Susi Pudjiastuti*, beritaresmi.com/profil-biografi-dan-biodata-susi-pudjiastuti.html, diakses pada 6 Desember 2014.
10. Kementrian Penerangan. *Kepartaian dan Parleментарia Indonesia*. Jakarta: Kementrian Penerangan. 1954.
11. King, Viktor D dan Willian D. Wilder. *Antropologi Modern Asia Tenggara: Sebuah Pengantar* terjemahan oleh Hatib Abdul kadir. Bantul: Kreasi Wacana. 2012.
12. Kompas, 1 Oktober 2013, *Dampak Desentralisasi Kurang Diperhitungkan: Rendah, Cakupan Pemeriksaan Kehamilan Kelompok Risiko Tinggi*.
13. Kompas, 1 Oktober 2013, *Kependudukan: Kematian Ibu Alarm Turunnya Pelayanan Kesehatan*.

14. Kompas, 21 April 2014, *Penurunan Angka Kematian Ibu Dikebut: Pemerintah Siapkan Enam Langkah.*
15. Kompas.com, 24 November 2014, *Kenangan Menteri Susi Menghadapi Tsunami,* bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/24/105042826/Kenangan.Menteri.Susi.Menghadapi.Tsunami, diakses 3 Desember 2014.
16. Kompas.com, 30 Oktober 2014, *Susi Pudjiastuti Juga Bangun Masjid Besar di Pangandaran,* regional.kompas.com/read/2014/10/30/08300001/Susi.Pudjiastuti.Juga.Bangun.Masjid.Besar.di.Pangandaran, diakses pada 7 Desember 2014.
17. KPU, *Pemilu 1999,* www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999, diakses pada 17 Desember 2014.
18. Macionis, John J. *Sociology.* New Jersey: Prentice-Hall. 1987.
19. Malau, Ita, *Kejinya Keluarga ini pada Pembantu Rumah Tangga,* RTV News 3 Desember 2012, www.rtv.co.id/read/news/309/kejinya-keluarga-ini-pada-pembantu-rumah-tangga, diakses pada 3 Desember 2014.
20. Margaret Mead di dalam Macionis, John J, *Sociology.* New Jersey: Prentice-Hall. 1987.
21. Martyn, Elizabeth, *The Women's Movement in Post-colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy.* New York: Routledge Curzon. 2005.
22. Misbahul Pratiwi, Andi, *UU Pilkada dan Ancaman Menyusutnya Kepemimpinan Perempuan,* Jurnal Perempuan 29 September 2014, <https://www.jurnalperempuan.org/blog-feminis-muda/uu-pilkada-dan-ancaman-menyusutnya-kepemimpinan-perempuan>, diakses 19 Desember 2014.
23. Oakley, Ann di dalam Gordon Marshall, *Oxford Dictionary of Sociology.* Oxford: Oxford University Press. 1998.
24. Oey-Gardiner, Mayling, “*And The Winner is... Indonesia Women in Public Life*”, dalam Kathryn Robinson dan Sharon Bessell (eds), *Women in Indonesia: Gender, Equity, and Development.* Singapore: ISEAS. 2002.
25. Oxford Dictionaries. *Definitions of Gender in English,* <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gender>, diakses pada 27 Januari 2014
26. Picchio, Anthonella. *Unpaid Work and the Economy: A Gender Analysis of the Standards of Living.* London: Routledge, 2003.
27. Poskotanews.com, 9 Juli 2014, *Upah Buruh Wanita Masih di Bawah Buruh*

- Laki-laki*,
poskotanews.com/2014/07/09/upah-
buruh-wanita-masih-di-bawah-buruh-
laki-laki/, diakses pada 6 Desember
2014.
28. Rahardjo, Yulfita. *Perbedaan antara Studi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita, dalam T.O. Ihromi (ed), Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
29. Robinson, Kathryn. "Indonesian Women's Rights, International Feminism, and Democratic Change dalam Communal/Plural Vol. 6 No. 2, 1998.
30. Sadli, Saporinah. "Feminism in Indonesia and in International Context", dalam Kathryn Robinson dan Sharon Bessell (eds), *Women in Indonesia: Gender, Equity, and Development* Singapore: ISEAS. 2002.
31. Shihab, Quraish. "Kata Pengantar: Kesetaraan Gender dalam Islam" dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta, Paramadina. 1999.
32. Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Penerbit Lentera hati. 2002.
33. Siregar, Wahidah. *Gaining Representation in Parliament: A Study of the Struggle of Indonesian Women to Increase Their Numbers in Parliaments in the 2004 Elections*. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2010.
34. Suryakusuma, Julia I. "The State and Sexuality in New Order Indonesia", di dalam Laurie J Sears (ed), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Durham: Duke University Press, 1996.
35. Suryochondro, Sukanti. *Timbul dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia;*, dalam T.O. Ihromi (ed), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995.
36. Tribunnews.com, 4 Desember 2014, *Kabinet Jokowi JK: Menteri Susi Miliki Harta Lebih Dari Rp 1 Triliun*, m.tribunnews.com/nasional/2014/12/04/menteri-susi-miliki-harta-lebih-dari-rp-1-triliun, diakses pada 7 Desember 2014.
37. Tuttle, Lisa. *Encyclopedia of Feminism*. London: Arrow Book. 1987.
38. TV One. *Satu Jam Lebih Dekat Susi Pudjiastuti*. 2016.
39. Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta, Paramadina. 1999.
40. Van Krieken, Robert. *Sociology: Themes and Perspectives*. French Forest: Pearson Education Australia.

41. Wearing, Betsy. *Gender: the Pain and Pleasure of Difference*. Melbourne: Longman. 1996.
42. Wharton, Amy S. *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*. Oxford: John Wiley & Sons Ltd. 2012.
43. White, Sally. *Gender and the Family*”, in Greg Fealy and Virginia Hooker (eds), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*. Singapore: ISEAS. 2006.
44. Widyawati, Setya. Pengembangan Soft Skill dalam Pendidikan sebagai Bekal Kewirausahaan. *Gelar* Vol 9 No.1 Juli 2011.
jurnal.isi.ska.ac.id/index.php/gelar/article/download/451/410, diakses pada 9 Desember 2014.
45. Wieringa, Saskia. *Sexual Politics in Indonesia*. London: Routledge. 2002.